

PERANAN DELIK DALAM FUNGSI DAN PERKEMBANGAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Komalasari¹, Azahra Nahdiah Munigar², Vina Tiarawati³

Forum Diskusi Ilmiah Hukum

komallasari3@gmail.com¹, azzhr01@gmail.com², vinatiarawati@gmail.com³

ABSTRAK

Perubahan sesuai dengan perkembangan zaman apalagi perkembangan teknologi media yang juga berkembang pesat. Pers di Indonesia mengalami perkembangan dari masa pers era orde baru yang saat itu dipimpin oleh Soeharto, pada masa itu kebebasan pers sangat dikekang dan banyak terjadi pembredelan, kemudian masa kepemimpinan Presiden Habibie yang membuat banyak perubahan di dunia pers, lalu pada era kepemimpinan Gus Dur dan Megawati kemajuan teknologi komunikasi berkembang pesat, banyak media cetak beralih ke media online, kemudian pers era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada saat itu SBY menerapkan pers yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Selama 10 tahun kepemimpinan SBY, pers Indonesia telah menikmati kebebasannya dan pada era ini pers begitu kritis dan konstruktif, yang terakhir pers pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sama seperti era kepemimpinan SBY, pers saat ini dijamin oleh pemerintah dengan prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat.

Kata kunci : Peran dan Fungsi Pers, Perkembangan, Sejarah

ABSTRACT

Changes according to the times, especially the development of media technology which is also growing rapidly. The press in Indonesia has developed from the press period of the New Order era which was then led by Suharto, at that time press freedom was severely restricted and there were many bans, then the leadership of President Habibie who made many changes in the press world, then in the era of the leadership of Gusdur and Megawati. advances in communication technology developed rapidly, many print media switched to online media, then the press under the leadership of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), at that time SBY implemented a press that was responsible for the community. During the 10 years of SBY's leadership, the Indonesian press has enjoyed its freedom and in this era the press is so critical and constructive, the last is the press in the era of President Joko Widodo's leadership which is the same as the era of SBY's leadership, the current press is guaranteed by the government with the principles of press freedom and freedom of opinion

Keywords: Role and Function of the Press, Development, History

PERANAN DELIK DALAM FUNGSI DAN PERKEMBANGAN PERS...

A. PENDAHULUAN

Salah satu fungsi pers yang tertuang pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 sebagai media pendidikan. Dalam menjalankan fungsi ini tentu pers diharapkan mampu menyampaikan informasi yang bersifat mendidik. Dengan cara ini, media mampu membantu untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mampu hidup mandiri. Itu artinya, media juga berperan penting menggiring masyarakat untuk mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia yang sebenarnya, Sistem demokrasi di Indonesia yang menganut kebebasan pers untuk berkumpul dan berpendapat. Sejarah perkembangan pers di Indonesia telah ada sebelum Indonesia merdeka dengan dibentuknya kantor berita ANTARA pada tanggal 13 desember 1937 dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Di era demokrasi terpimpin ada larangan terhadap kegiatan politik termasuk dengan pers. Contohnya seperti persyaratan untuk mendapatkan surat izin terbit dan cetak diperketat. Terjadi pengekan terhadap pers dengan adanya tindakan pemerintah untuk menyensor dan membredel pers.

Masa era reformasi tahun 1998 pers Indonesia kembali bangkit dari keterpurukan dan kebebasan terhadap pers dibuka kembali. Pada tanggal 23 september 1999, Presiden ke-3 RI, BJ Habibie mengesahkan UU Nomor 40 tahun 1999, tentang Pers dan mencabut wewenang pemerintah untuk menyensor dan membredel pers.

Menurut UU Tentang Pers No. 40 Tahun 1999, dikatakan bahwa pers adalah lembaga sosial serta wahana komunikasi massa untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik. Hal ini terdiri dari mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk lisan, tulisan, suara, gambar maupun media elektronik, dan segala saluran yang tersedia. Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa pers adalah lembaga sosial yang bersifat independen dan mempunyai kewenangan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pers juga memiliki kemerdekaan untuk memperoleh, mengolah, Pers di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dimulai dari masa Orde Baru atau masa pemerintahan Soeharto sampai saat ini yaitu masa pemerintahan Joko Widodo. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan,

PERANAN DELIK DALAM FUNGSI DAN PERKEMBANGAN PERS...

hiburan, dan kontrol sosial, seperti laut, pers di Indonesia mengalami pasang surut dalam menjalankan fungsinya sebagai berikut. Pada zaman era Orde Baru yaitu Era kepemimpinan Soeharto pers di Indonesia tunduk pada sistem politik atau pemerintah, pada masa era Orde Baru jika seseorang ingin membangun suatu perusahaan pers maka harus memiliki surat izin penerbitan pers (SIUPP) yang diatur di dalam Permenpen No.01/Pers/Menpen 1984, yang dikeluarkan oleh Menteri Departemen Penerangan (DEPPEN), hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa pemerintah memiliki legitimasi dalam mengekang kebebasan pers di Indonesia, padahal dalam Undang-Undang Pokok Pers No. 11 tahun 1996 mengatur dan menjamin kebebasan dalam menyiarkan pemberitaan.

Runtuhnya masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, membuat banyak perubahan dalam segala aspek kehidupan dan pemerintahan di Indonesia, termasuk sistem pers, pers yang dulunya di bawah kendali pemerintah atau tunduk pada sistem politik, kini mulai mendapatkan penerangan dengan dicabutnya peraturan penggunaan SIUPP (surat izin usaha perusahaan pers) karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Dengan begitu, pengurusan untuk mendirikan perusahaan atau penerbit pers tidak lagi berbelit-belit dan melewati birokrasi yang sangat rumit.

Pada era pemerintahan Gus Dur, Departemen Penerangan (DEPPEN) yang selama ini diibaratkan menjadi tembok raksasa yang sulit diruntuhkan bagi kebebasan pers di Indonesia dihapuskan, meskipun sebelumnya pada era Habibie, penghapusan SIUPP sudah dilakukan, tetapi otoritarianisme pemerintah terhadap pers masih ada.

Pers era kepemimpinan SBY menerapkan pers yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Sebuah perpaduan ideal antara kebebasan pers dan kesadaran pengelola media massa (insan pers), khususnya untuk tidak berbuat semena-mena dengan kemampuan, kekuatan serta kekuasaan media massa (the power of the press).

Setelah kepemimpinan SBY, pers di Indonesia juga tetap harus mempertahankan kritis dan kondusif pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peranan dan fungsi pers menurut UUD serta kebebasan dan perkembangan pers di Indonesia, Menurut UU Tentang Pers No. 40 Tahun 1999, dikatakan bahwa pers adalah lembaga sosial serta wahana komunikasi massa untuk melaksanakan

PERANAN DELIK DALAM FUNGSI DAN PERKEMBANGAN PERS...

kegiatan jurnalistik. peran yang sangat penting dalam proses demokrasi di suatu negara, untuk Kebebasan pers adalah Hak Asasi bagi setiap warga negara, perkembangan dari masa ke masa Dimulai dari masa Orde Baru atau masa pemerintahan Soeharto sampai saat ini yaitu masa pemerintahan Joko Widodo. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai Peranan, Fungsi serta Perkembangan Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *penelitian hukum normatif*, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada asas-asas atau kaidah-kaidah dalam hukum yang kemudian menjadi konsep norma yang bersumber dari undang-undang, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum yang memiliki kompetensi.¹ Metode ini bertujuan mencari pengetahuan yang benar mengenai hukum normatif. Dikatakan hukum normatif karena pada dasarnya semua hukum bersifat otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri, bukan ditentukan oleh faktor-faktor di luar hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Peran dan Fungsi Pers menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999

Pers memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokrasi di suatu negara. Kebebasan pers adalah Hak Asasi bagi setiap warga negara. Kebebasan pers adalah hak yang diberikan dengan perlindungan hukum yang berkenaan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, mencetak, menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Sistem demokrasi di Indonesia yang menganut kebebasan pers untuk berkumpul dan berpendapat. Sejarah perkembangan pers di Indonesia telah ada sebelum Indonesia merdeka dengan dibentuknya kantor berita ANTARA pada tanggal 13 desember 1937 dalam

¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press (Banten: 2018), hlm. 57.

PERANAN DELIK DALAM FUNGSI DAN PERKEMBANGAN PERS...

rangka perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Di era demokrasi terpimpin ada larangan terhadap kegiatan politik termasuk dengan pers. Contohnya seperti persyaratan untuk mendapatkan surat izin terbit dan cetak diperketat. Terjadi pengekangan terhadap pers dengan adanya tindakan pemerintah untuk menyensor dan membredel pers. Masa era reformasi tahun 1998 pers Indonesia kembali bangkit dari keterpurukan dan kebebasan terhadap pers dibuka kembali. Pada tanggal 23 september 1999, Presiden ke-3 RI, BJ Habibie mengesahkan UU Nomor 40 tahun 1999, tentang Pers dan mencabut wewenang pemerintah untuk menyensor dan membredel pers.

Menurut UU Tentang Pers No. 40 Tahun 1999, dikatakan bahwa pers adalah lembaga sosial serta wahana komunikasi massa untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik. Hal ini terdiri dari mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk lisan, tulisan, suara, gambar maupun media elektronik, dan segala saluran yang tersedia. Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa pers adalah lembaga sosial yang bersifat independen dan mempunyai kewenangan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pers juga memiliki kemerdekaan untuk memperoleh, mengolah, serta menyampaikan pikiran via lisan maupun tulisan.

Menurut UU No.33 Tentang Pers No.40 Tahun 1999, dijelaskan bahwa pers adalah media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial yang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pers sebagai Media Informasi

Fungsi pers yang paling penting dan utama adalah sebagai sarana media informasi. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui informasi mengenai berbagai hal, seperti informasi ekonomi, politik, hobi, dan lain sebagainya. Pers memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan informasi dalam rangka mendukung kemajuan untuk masyarakat.

2. Pers sebagai Media Pendidikan

Pers juga turut serta dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Pers berperan penting dalam pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan hidup manusia. Informasi yang disebarluaskan melalui media sangat berfungsi untuk mendidik, mencerdaskan, dan mendorong seseorang agar berbuat kebaikan.

3. Pers sebagai Media Hiburan

PERANAN DELIK DALAM FUNGSI DAN PERKEMBANGAN PERS...

Pers juga dapat dikatakan sebagai media hiburan. Bentuk hiburan yang disajikan oleh pers harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku, harus tetap mendidik dan tidak melanggar nilai moral, HAM, agama, dan peraturan lain yang tidak diperbolehkan untuk ditampilkan.

4. Pers sebagai Media Kontrol Sosial

Pers juga digunakan untuk mengontrol, mengoreksi, serta mengkritik sesuatu yang bersifat tidak membangun. Dalam pelaksanaannya, pers bertugas untuk mengatur dan mengawasi jalannya birokrasi agar dapat mencegah terjadinya penyelewengan, seperti Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN).

5. Pers sebagai Lembaga Ekonomi

Pers juga memiliki manfaat sebagai lembaga ekonomi. Di mana media massa tidak hanya bertujuan untuk menghidupi penerbit media massa sendiri, tetapi juga dituntut untuk mampu membantu lapangan pekerjaan. Pers diharapkan dapat berorientasi pada kepentingan publik daripada kepentingan bisnis [.https://m.merdeka.com/jateng/5-fungsi-pers-beserta-peranannya-dalam-memberikan-informasi](https://m.merdeka.com/jateng/5-fungsi-pers-beserta-peranannya-dalam-memberikan-informasi) Banyak kasus yang mengesampingkan UU Pers terutama pada pihak penegak hukum, hakim, jaksa dan polisi dengan alasan yang berbagai macam untuk tidak mau memakai UU yang khusus mengatur pers. KUHP yang merupakan produk kolonial ratusan tahun yang lalu memang dibuat untuk menjerat pers, anehnya Indonesia sebagai negara jajahannya membuat UU dan RUU yang hukumannya jauh lebih tinggi dari negara penjajah yang bisa menjerat semua warga negaranya termasuk wartawan.

2. Perkembangan Serta Kebebasan Pers di Indonesia

Pers di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dimulai dari masa Orde Baru atau masa pemerintahan Soeharto sampai saat ini yaitu masa pemerintahan Joko Widodo. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, seperti laut, pers di Indonesia mengalami pasang surut dalam menjalankan fungsi nya sebagai berikut:

PERANAN DELIK DALAM FUNGSI DAN PERKEMBANGAN PERS...

1. Pers Era Orde Baru atau Era Kepemimpinan Presiden Soeharto

Pada zaman era Orde Baru yaitu Era kepemimpinan Soeharto pers di Indonesia tunduk pada sistem politik atau pemerintah, pada masa era Orde Baru jika seseorang ingin membangun suatu perusahaan pers maka harus memiliki surat izin penerbitan pers (SIUPP) yang diatur di dalam Permenpen No.01/Pers/Menpen 1984, yang dikeluarkan oleh Menteri Departemen Penerangan (DEPPEN), hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa pemerintah memiliki legitimasi dalam mengekang kebebasan pers di Indonesia, padahal dalam Undang-Undang Pokok Pers No. 11 tahun 1996 mengatur dan menjamin kebebasan dalam menyiarkan pemberitaan. Apalagi kedudukan Undang-Undang itu seharusnya lebih kuat dibandingkan dengan Permenpen. Tidak hanya penerbitan pers saja yang dibatasi, pembentukan organisasi kewartawan juga dibatasi, maka saat masa kepemimpinan Soeharto hanya ada 1 (satu) organisasi wartawan yaitu PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Pada tanggal 21 Juni 1994 terjadi pembredelan media Tempo, Editor, dan DeTIK, hal ini disebabkan karena laporan media tersebut tentang impor kapal perang dari Jerman yang dilakukan oleh B.J Habibie yang diduga melakukan mark-up harga kapal impor tersebut. Pemberitaan tersebut membuat Soeharto marah besar dan memerintahkan Harmoko (Menteri Penerangan saat itu) untuk melakukan pembredelan terhadap ketiga media tersebut tanpa melalui proses hukum di pengadilan. Setelah terjadinya kasus pembredelan majalah Tempo, Editor, dan DeTik lalu terbentuklah AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia) yang merupakan wujud ketidakpuasan terhadap PWI.

2. Pers Era Kepemimpinan Presiden Habibie

Runtuhnya masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, membuat banyak perubahan dalam segala aspek kehidupan dan pemerintahan di Indonesia, termasuk sistem pers, pers yang dulunya di bawah kendali pemerintah atau tunduk pada sistem politik, kini mulai mendapatkan penerangan dengan dicabutnya peraturan penggunaan SIUPP (surat izin usaha perusahaan pers) karena dianggap melanggar hak asasi manusia

PERANAN DELIK DALAM FUNGSI DAN PERKEMBANGAN PERS...

(HAM). Dengan begitu, pengurusan untuk mendirikan perusahaan atau penerbit pers tidak lagi berbelit-belit dan melewati birokrasi yang sangat rumit. Dalam waktu singkat pasca pencabutan SIUPP tersebut, mulai bermunculan banyak perusahaan media di Indonesia. Demikian pula halnya dengan munculnya beberapa organisasi kewartawanan yang dahulu hanya memiliki satu wadah tunggal yaitu PWI (persatuan wartawan Indonesia). Kebebasan pers yang baru saja dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada era Habibie ini mendatangkan beberapa dampak, kebebasan pers yang berarti kebebasan dalam menayangkan berbagai berita tidak hanya mendatangkan dampak yang positif saja, tetapi juga mendatangkan dampak yang negatif. Kebebasan dalam pemberitaan mengakibatkan terjadinya *trial by the press* (pengadilan oleh pers) yaitu berita atau tulisan dengan gambar tertuduh dalam suatu perkara pidana yang memberi kesan bersalah. Hal ini melanggar asas praduga tak bersalah dan menyulitkan tertuduh untuk memperoleh pemeriksaan pengadilan yang bebas dan tidak berpihak.

3. Pers Era Kepemimpinan Presiden Gus Dur Dan Megawati

Pada era pemerintahan Gus Dur, Departemen Penerangan (DEPPEN) yang selama ini diibaratkan menjadi tembok raksasa yang sulit diruntuhkan bagi kebebasan pers di Indonesia dihapuskan, meskipun sebelumnya pada era Habibie, penghapusan SIUPP sudah dilakukan, tetapi otoritarianisme pemerintah terhadap pers masih ada. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dimana DEPPEN memiliki kewenangan dalam menentukan bagaimana nasib perusahaan pers dan hal ini bukan tidak mungkin akan berulang lagi. Pada saat itu, seharusnya banyak perusahaan penerbitan media baru di Indonesia, namun ternyata yang terjadi adalah banyak perusahaan media yang gulung tikar akibat dihapuskannya SIUPP dan DEPPEN. Kemajuan teknologi komunikasi yang semakin berkembang membuat perilaku khalayak media juga berubah, akhirnya banyak media cetak yang beralih ke media online dimana sampai detik ini banyak yang mengakses berita melalui media online seperti mencari berita terkini melalui website (kompas, detik.com, dan lain-lain).

4. Pers era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Pers era kepemimpinan SBY menerapkan pers yang bertanggung jawab

PERANAN DELIK DALAM FUNGSI DAN PERKEMBANGAN PERS...

terhadap masyarakat. Sebuah perpaduan ideal antara kebebasan pers dan kesadaran pengelola media massa (insan pers), khususnya untuk tidak berbuat semena-mena dengan kemampuan, kekuatan serta kekuasaan media massa (*the power of the press*). Meskipun pers di era SBY menerapkan pers yang bertanggung jawab, tetapi tidak mengurangi kebebasan pers pada saat itu, pemerintah tidak pernah ikut campur mengenai urusan kebebasan pers. Dibawah kepemimpinan SBY selama 10 (sepuluh) tahun pers Indonesia benar-benar telah menikmati kebebasannya. Pers di era kepemimpinan SBY kritis dan konstruktif. Pada masa akhir masa pemerintahan SBY media berita online berkembang sangat pesat, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat sangat faktual, dan transparan, sehingga masyarakat mengetahui perkembangan jalannya pemerintahan dan dapat memberikan umpan balik yang lebih cepat terhadap situasi yang sedang berlangsung.

5. Pers Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Setelah kepemimpinan SBY, pers di Indonesia juga tetap harus mempertahankan kritis dan kondusif pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo. Pers di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dijamin oleh pemerintah dengan menjamin prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat, kebebasan yang dipandu oleh tanggung jawab moral, kebebasan yang beretika dan bertata krama, dan kebebasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Masa ini pers diminta untuk terus meneguhkan jati dirinya sebagai sumber informasi yang akurat bagi masyarakat, mengedukasi masyarakat, melakukan kontrol sosial, untuk terus memberikan kritik-kritik yang konstruktif kepada pemerintah.

D. PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pers merupakan lembaga sosial atau komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan cara mencari, memperoleh menyimpan, memiliki, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk lisan, tulisan, suara, gambar maupun media elektronik. Peran dan fungsi pers menurut Undang

PERANAN DELIK DALAM FUNGSI DAN PERKEMBANGAN PERS...

Undang No. 40 Tahun 1999 yaitu sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, media kontrol sosial dan sebagai lembaga ekonomi.

2. Perkembangan pers di Indonesia senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman apalagi perkembangan teknologi media yang juga berkembang pesat. Pers di Indonesia mengalami perkembangan dari masa pers era orde baru yang saat itu dipimpin oleh Soeharto, pada masa itu kebebasan pers sangat dikekang dan banyak terjadi pembredelan, kemudian masa kepemimpinan Presiden Habibie yang membuat banyak perubahan di dunia pers, lalu pada era kepemimpinan Gus Dur dan Megawati kemajuan teknologi komunikasi berkembang pesat, banyak media cetak beralih ke media online, kemudian pers era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada saat itu SBY menerapkan pers yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Selama 10 tahun kepemimpinan SBY, pers Indonesia telah menikmati kebebasannya dan pada era ini pers begitu kritis dan konstruktif, yang terakhir pers pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sama seperti era kepemimpinan SBY, pers saat ini dijamin oleh pemerintah dengan prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Dalam Jurnal Online

Arnu, Sri Hadijah. (2015). Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia.

Mahdi, Acan. Kebebasan Pers dan Hak Publik. hlm 24 <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/download/67/62>

Oktaviani, S., Yeremia Juan Dewata, & Aryo Fadlian. (2021). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KEBOCORAN DATA BPJS DALAM PERSPEKTIF UU ITE. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(2), 146–157. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5732>

Buku :

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press.

Internet :

www.kominfo.com “Presiden Tegaskan Jaminan Kemerdekaan Pers dan Berpendapat” (2019)

<https://m.merdeka.com/jateng/5-fungsi-pers-beserta-peranannya-dalam-memberikan-informasi>

Dll :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers